

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari)

Grace M. Sirande, Anik Wuriasih*, Simson Werimon, Marlina Malino
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Papua

Article History

Received: June 7, 2022

Accepted: June 30, 2022

*Corresponding Author:

Email:

a.wuriasih@unipa.ac.id

Abstract

This study was conducted to answer the existing problems, namely whether budget participation, clarity of budget targets, quality of human resources, functional supervision on performance. Performance tested was the performance of government officials in Manokwari Regency. The research was conducted by survey by distributing questionnaires to officials directly involved in the budgeting process, the three officials in each the regional work units (OPD). The questionnaire can be used amounted to 84 questionnaire. Instrument test and classical test show that all data are valid and reliable and meet the testing criteria so that research can be continued with multiple linear regression of the data. The result showed budget participation and quality of human resources has positive influence on the performance of government officials. While the clarity of budget targets and functional supervision was not influenced on the performance of government officials. The determination coefficient test states that the four variables are able to have an effect on performance of government officials by 60,2%, while the remaining 39,8% is influenced by other variables outside the research.

Keywords: *Performance of government official; Budget participation; Clarity of budget targets; Quality of human resources; Functional supervision*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu apakah partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumberdaya manusia dan pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja. Kinerja yang diuji adalah kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para pejabat yang terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran, yaitu tiga orang pejabat di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kuesioner yang dapat digunakan berjumlah 84 kuesioner. Uji instrumen dan uji klasik menunjukkan semua data valid dan reliabel dalam memenuhi kriteria pengujian, sehingga penelitian dapat dilanjutkan dengan meregresi linear berganda data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran dan kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari akan tetapi kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari. Uji koefisien determinasi menyebutkan bahwa keempat variabel mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah sebesar 60,2% sedangkan sisanya sebesar 39,8% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian.

Kata kunci: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah; Partisipasi penyusunan anggaran; Kejelasan sasaran anggaran; Kualitas sumberdaya manusia, Pengawasan fungsional

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu isu yang menjadi sorotan publik adalah kinerja pemerintah daerah sejak terlaksananya otonomi daerah. Dimana hasil kinerja selama ini belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, yang seharusnya adalah tugas dan tanggung jawab dari pemerintah untuk memberikan hasil yang maksimal terhadap pelayanan kepada masyarakat. Penerapan pada konsep otonomi daerah menjadi tuntutan terhadap semua pemerintah agar menjalankan kinerja yang maksimal dan baik dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait (Auditya *et.al.*: 2013).

Perubahan cara pandang dari penerapan yang terpusat menjadi otonomi daerah oleh pemerintah, memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab agar dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan yaitu memberikan kemakmuran kepada rakyat. Bahkan juga memberikan tanggung jawab kepada daerah agar digunakan dengan maksimal oleh pemerintah daerah dengan pengalokasian dana secara efektif dan efisien. Sehingga dapat tercapainya harapan pembangunan daerah dengan pengalokasian dana secara baik.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi lebih berperan aktif dalam memberikan pelayanan secara maksimal untuk melaksanakan pengelolaan anggaran pada wilayah masing-masing daerah yang menerapkan otonomi daerah. Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwasannya sasaran pelayanan publik melingkupi 3 fungsi utama antara lain: (1) Memberikan pelayanan yang penting secara menyeluruh kepada masyarakat, (2) Mendeskripsikan asas operasional masyarakat, dan (3) Mempersiapkan keperluan bagi pelayanan untuk masyarakat sebagai layanan publik.

Dengan berkembangnya organisasi di bidang publik maka pemerintah semakin dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pecapaian hasil dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pemerintah yang secara nyata dan maksimal menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dikatakan baik. Capaian dari hasil kinerja suatu organisasi merupakan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Mahsun, 2006).

Anggaran dan penganggaran memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mengukur kinerja dalam waktu tertentu. Anggaran yaitu sebagai pembiayaan yang akan digunakan sebagai estimasi terhadap kinerja sedangkan penganggaran dijelaskan sebagai tahapan dalam menyiapkan anggaran. Dengan demikian anggaran sektor publik yang dilakukan dari awal

perencanaan sampai pada pelaporannya perlu dikontrol dan dievaluasi agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran dikembangkan berdasarkan sistem anggaran agar tidak terjadi penyelewengan anggaran dana dalam mengelolanya, sehingga perlu dikembangkan sistem anggaran yang terdiri dari penyusunan, pembahasan, penetapan sampai pengawasan pelaksanaan anggaran. Capaian kinerja menjadi tolak ukur yang dapat dilihat melalui keluaran, hasil atau manfaat dan sudah sesuai tidaknya anggaran yang di berikan kepada kelompok sasaran, sehingga kinerja pemerintah dinilai berdasarkan masukan, pengeluaran, hasil dan dampaknya dari anggaran tersebut terhadap masyarakat sebagai sasaran utama, tiga elemen menjadi bagian yang utama sebagai alokasi biaya dan pelayanan yang terdiri dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan suatu program diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur diantaranya, partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan kerja sama semua pegawai didalam tempat kerja atau instansi untuk mengelola anggaran yang telah diberikan pemerintah untuk mencapai kinerja yang diharapkan , sehingga melalui keterlibatan tersebut diharapkan akan memberikan motivasi, baik dari kepala bagian hingga seluruh pegawai untuk bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dengan demikian seluruh pegawai dan kepala bagian akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan hasil penelitian Mertyani Sari Dewi, et al. (2015) partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh serta signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Selain partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumberdaya manusia serta pengawasan fungsional juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja pada aparat Pemerintah Daerah. Kejelasan sasaran anggaran merupakan tinjauan mengenai anggaran yang dapat dicapai oleh ketetapan yang telah ditentukan. Sasaran anggaran dilakukan dengan jelas dan spesifik untuk tujuan anggarannya agar dapat dipahami oleh semua pengelola. Dengan begitu kejelasan sasaran anggaran bisa memberikan pemahaman kepada aparat pelaksana anggaran untuk merealisasikan anggaran secara tepat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hevyana Naipospos (2015) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Sumberdaya Manusia (SDM) sebagai penggerak terlaksananya kegiatan dari program yang direncanakan, perlu memahami tugas dan tanggungjawabnya pada instansi pemerintahan agar dapat berkontribusi baik dalam tindakan, pendapat, dan mampu dalam mencapai sasaran sebagai tujuan dari instansi pemerintah. Kualitas SDM juga diperlukan

dalam pengelolaan keuangan di setiap instansi Pemerintah Daerah agar dapat mengelola keuangan daerah lebih baik. Kualitas SDM dapat terpenuhi melalui upaya menempuh pendidikan dengan jenis bidang yang ditekuni, aktif mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman kerja dibidang keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mertyani Sari Dewi, et al. (2015) bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan fungsional sebagai penerapan yang penting dalam satuan kerja pemerintahan baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memiliki arti bahwa sebagai tindakan evaluasi dan rekomendasi mengenai program kegiatan untuk ditindaklanjuti dengan lebih baik secara efektif dan efisien dengan harapan dari suatu kegiatan tidak terdapat penyimpangan dari rencana awal anggaran yang telah disepakati untuk diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mertyani Sari Dewi, et al. 2015) pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian terkait upaya pencapaian kinerja yg dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah inilah yg mendorong untuk dilakukannya penelitian ini kembali. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja aparat Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Manokwari, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan dan penyerapan anggaran sesuai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hasil dari penerapan kinerja yang baik tentu akan memberikan tingkat kepuasan bagi masyarakat .

LANDASAN TEORI

Definisi Kinerja

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Menurut Wibowo (2007:3) kinerja itu berasal dari kata *performance* yang berarti hasil pekerjaan atau prestasi kerja, namun perlu dipahami bahwa kinerja itu bukan sekedar hasil pekerjaan atau prestasi tetapi juga mencakup bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung. Menurut Mangkunegara (2011) dalam Friyanti (2019), kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

Menurut Indra Bastian (2006), upaya perbaikan akan dapat ditindaklanjuti untuk mencapai keberhasilan apabila dilakukan peninjauan terhadap pengukuran kinerja secara berkala. Sebuah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program,

kebijakan dari instansi pemerintah diperlukan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilannya, kinerja merupakan sarana mencapai sasaran yang merupakan tujuan, visi dan misi dalam organisasi dimana hal ini merupakan perumusan dari skema strategis. Dalam periode tertentu dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja merupakan prestasi dari organisasi, yang mana seluruh kegiatan dari aktivitas organisasi dapat diukur tingkat capaiannya. dilihat dari *input*, *output*, dan *outcome* dan manfaat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kinerja Manajerial

Dalam konteks Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hubungannya dengan penyelenggara tugas dan peran manajerial OPD pada pemerintah daerah adalah kinerja yang merupakan hasil dari proses pekerjaan yang dilakukan oleh manajerial OPD berupa pencapaian prestasi dari instansi tempat mereka bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, pengukuran kinerja OPD dilakukan untuk menilai seberapa baik OPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja OPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah, yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

Menurut Mahoney (1963) dalam Afrida (2013) yang dimaksud kinerja manajerial merupakan kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, negosiasi dan perwakilan. Weihrich dan Koonzth (2005) dalam Afrida (2013) mendefinisikan kinerja manajerial sebagai kinerja manajer dalam mengerti dan memahami fungsi manajer dalam mencapai sasaran kinerjanya, yang diukur dari bagaimana manajer tersebut menjalankan aktivitas manajerialnya seperti: *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading*, dan *controlling*.

Dimensi Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan aparat instansi tersebut. Menurut Mahoney (1963) dalam Afrida (2013), terdapat 8 dimensi kinerja manajerial, antara lain:

- 1) Perencanaan
- 2) Investigasi
- 3) Koordinasi
- 4) Evaluasi
- 5) Pengawasan

- 6) Pemilihan Staff
- 7) Negosiasi, dan
- 8) Perwakilan

Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Friyanti (2019) anggaran berbasis kinerja memuat indikator kinerja yang bertujuan menyelaraskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari suatu kegiatan dengan kebijakan dan program. Suatu rencana kinerja memuat berbagai komponen berikut:

- 1) Tujuan dan sasaran
- 2) Program
- 3) Kegiatan
- 4) Indikator kinerja kegiatan

Karakteristik anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka penerapannya dilihat dari *outcome*, memiliki hubungan dari *input* terhadap *output* yang mencerminkan berfungsinya keluaran dan merupakan bagian dari persentase pencapaian sasaran program dan keterlibatannya, sehingga diperlukan tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja (Hindri Asmoko, 2006). Manfaat pengukuran dan evaluasi kinerja dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagai berikut:

- 1) Membantu mempersiapkan laporan kinerja dalam waktu yang singkat
- 2) Kekurangan-kekurangan yang terdeteksi akan diperbaiki dan tetap menjaga kinerja yang sudah baik
- 3) Sebagai informasi yang mendasar penting dalam melakukan evaluasi program
- 4) Sebagai bahan masukan maupun rekomendasi kebijakan untuk tahap selanjutnya, dan
- 5) Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. OPD merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan OPD adalah Pasal 120 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu penerapan yang dapat meningkatkan kinerja dari instansi pemerintah dalam hal ini setiap pegawai yang terlibat saling bekerjasama dalam menyusun anggaran (Nurhalimah, 2013). Partisipasi melibatkan individu saling bekerja sama dalam kelompok yang memiliki tujuan bersama untuk menuangkan pendapat dan tindakan secara mental dan emosional (Soetrisno, 2010). Dengan partisipasi dapat dilihat bahwa pegawai yang terlibat mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai sasaran yang direncanakan dan saling berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisien (Munawar, 2006).

Friyanti (2019) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- 1) Memberi pengaruh yang sehat terhadap adanya inisiatif, moralisme dan antusiasme
- 2) Memberikan suatu hasil yang lebih baik dari sebuah rencana karena adanya kombinasi pengetahuan dari beberapa individu
- 3) Dapat meningkatkan kerjasama antar departemen, dan
- 4) Para karyawan dapat lebih menyadari situasi di masa yang akan datang yang berkaitan dengan sasaran dan pertimbangan lain.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Sebagai pengukur terhadap tujuan anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik untuk digunakan oleh orang yang bertanggung jawab itulah yang dikatakan sebagai kejelasan sasaran anggaran (Suhartono dan Solichin, 2006). Menurut Putra (2013) bahwa dalam menentukan sasaran anggaran harus memiliki dua karakteristik berikut, yaitu karakteristik harus spesifik bukan samar-samar dan sasaran harus menantang namun dapat dicapai.

Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Mulyani (2016) agar pengukuran sasaran efektif terdapat 7 indikator yang diperlukan, yaitu:

- 1) Tujuan
- 2) Kinerja
- 3) Standar
- 4) Jangka waktu
- 5) Sasaran prioritas
- 6) Tingkat kesulitan
- 7) Koordinasi

Kualitas Sumberdaya Manusia

SDM sebagai tenaga kerja dalam pemerintahan merupakan elemen penting dan perlunya diberikan perhatian khusus, dimana pemerintah perlu melengkapi setiap SDM (Yusuf, 2015). SDM sangat penting dalam dunia pekerjaan, organisasi tidak akan dapat berjalan tanpa SDM, hal ini dikarenakan SDM memiliki potensi dalam merancang dan menghasilkan pengeluaran sebagai sasaran yang telah ditentukan untuk capaian tujuan suatu organisasi (Yusuf, 2015). Kualitas SDM adalah pegawai yang menjadi aset berharga dalam organisasi dengan kriteria menempuh pendidikan, mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman (Riawan, 2016).

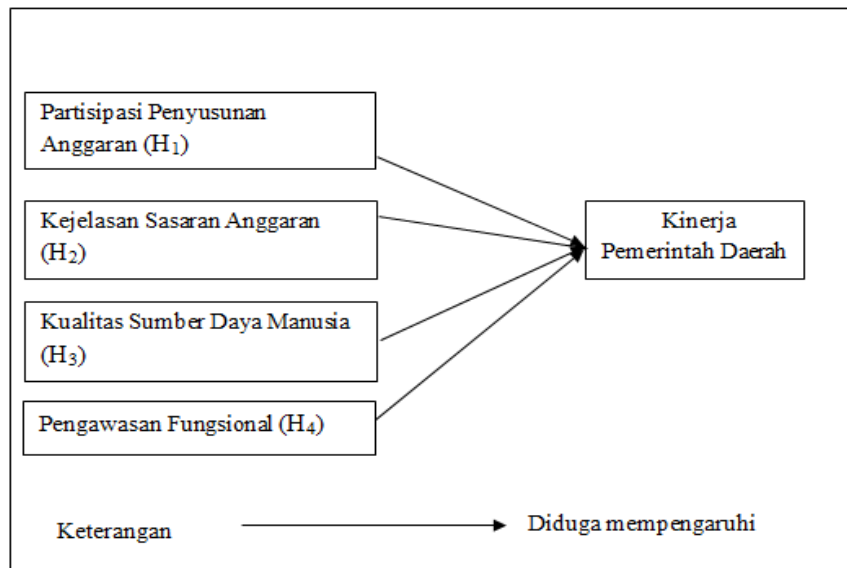
Pengawasan Fungsional

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pengertian pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian pengusutan, dan penilaian. Tujuan dari pengawasan fungsional di instansi pemerintah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara ekonomis, secara efisien dan secara efektif.
- 2) Semua kegiatan yang ditargetkan terkait penyelenggaraan pelaksanaan keuangan akan terlaksana tanpa adanya penghambat dan tindakan penyimpangan.
- 3) Tercapainya pelaksanaan kewajiban di instansi pemerintah dan pembangunan secara merata secara tertib.

Model Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah, serta teori yang sudah dijabarkan, sehingga dapat membentuk model hipotesis sebagai berikut:



Gambar 1. Model Hipotesis

Sumber : Data diolah Peneliti (2020)

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Partisipasi penyusunan anggaran yang merupakan tindakan kerjasama antara pegawai instansi pemerintah sebagai pendekatan kinerja yang dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan peningkatan kinerja dengan tujuan akhir yang direncanakan (Nurhalimah, 2013), dalam artian kesadaran setiap individu dalam melaksanakan tugas yang diembankan dengan rasa tanggungjawab. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Sri Rahayu, et al. (2014) membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah, secara empiris ini sejalan dengan Penelitian Mediaty (2010) dan Martyani Sari Dewi, et al. (2015) bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₁ : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah

Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dapat dilihat dari ketidakjelasan sasaran anggaran dan dapat mempengaruhi aparat pemerintah daerah sehingga mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran berkaitan pada pimpinan dalam menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Sehingga Pimpinan akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Sasaran anggaran yang jelas dapat memudahkan OPD guna menyusun target anggaran. Dengan begitu target-target anggaran yang disusun dapat sesuai dengan sasaran yang akan dicapai pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh

Annisa Pratiwy Suwandi (2013) membuktikan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota Padang, ini sejalan dengan Penelitian Syafrial (2009), dan Reyhan Hady Fauzan (2017) bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

H₂ : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah

Kualitas SDM adalah pegawai yang menjadi aset berharga dalam organisasi dengan kriteria menempuh pendidikan, mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman (Riawan, 2016), dengan demikian maka pertanggungjawaban terhadap pelaporan keuangan akan menjadi berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Sri Rahayu, et al. (2014) membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas SDM terhadap kinerja pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa Secara empiris hasil penelitian Ni Luh Sri Rahayu, et al. (2014) konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharto (2012) dan Mertayani Sari Dewi, (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₃ : Kualitas Sumberdaya Manusia berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah

Pengawasan fungsional memberikan dampak yang baik, hal ini dikarenakan perencanaan yang ditentukan oleh OPD dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya. Penelitian yang dilakukan oleh Mertayani Sari Dewi, et al. (2015) membuktikan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Putri (2013) dan didukung dengan hasil penelitian oleh Ni Luh Sri Rahayu, et al. (2014) yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H₄ : Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari jawaban responden atau kuesioner yang diberikan sebelumnya. Peneliti akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden yang bekerja pada Dinas/Badan dalam lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Manokwari. Populasi dalam penelitian ini adalah 23 OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari, antara lain Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran, Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sampel diperoleh sebanyak 92 pegawai, dimana masing-masing OPD diwakili oleh Kepala Dinas/Badan, Kepala sub Bagian keuangan/aset serta Kepala sub Bagian umum dan kepegawaian.

Definisi Operasional

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y)

Menurut MenPAN (2007) kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang harus dicapai suatu organisasi.

Indikator kinerja aparat Pemerintah Daerah, antara lain:

- 1) Objektif
- 2) Tepat sasaran
- 3) Tepat waktu
- 4) Pencapaian target

Partisipasi Penyusunan Anggaran (X₁)

Saling memberikan tanggapan baik bawahan kepada pimpinan dalam pemberian pertimbangan dan usulan untuk mengambil keputusan, mempersiapkan dan merevisi anggaran (Sumiati, 2018).

Indikator partisipasi penyusunan anggaran menurut Milani (1975), antara lain:

- 1) Intensitas opini
- 2) Keterlibatan proses
- 3) Kepentingan berpendapat serta kesediaan berpendapatan
- 4) Kepuasan hasil akhir

Kejelasan Sasaran Anggaran (X₂)

Sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Suhartono dan Mochammad, 2006).

Indikator kejelasan sasaran anggaran menurut Bukhori (2012), antara lain:

- 1) Mudah dimengerti
- 2) Menantang tapi realistis
- 3) Anggaran disesuaikan dengan rencana
- 4) Berorientasi pada hasil akhir
- 5) Ada kerjasama antar tim

6) Memilih rencana yang tepat sasaran

7) Anggaran yang ada dialokasikan dengan tujuan yang jelas

Kualitas Sumberdaya Manusia (X₃)

Merupakan elemen penting yang ada dalam setiap organisasi pemerintah, SDM yang berkualitas dan tepat yang dapat menjadi aset berharga dalam organisasi (Riawan, 2016).

Indikator kualitas sumberdaya manusia menurut Riawan (2016), antara lain:

- 1) Latar belakang pendidikan
- 2) Mengikuti pelatihan
- 3) Memiliki pengalaman

Pengawasan Fungsional (X₄)

Bentuk kegiatan yang dilakukan bersinambungan agar dapat mengetahui, menilai dan memahami suatu kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah penyimpangan (Laksana dan Handayani, 2014).

Indikator pengawasan fungsional menurut Wati (2010), antara lain:

- 1) Pengawasan
- 2) Pengakajian
- 3) Pengusutan

Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan suatu analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan teknik tabulasi frekuensi dan analisis linear berganda dengan bantuan program komputer SPSS. Sebelum dilakukan proses olah data maka peneliti melakukan uji kualitas data dengan melakukan uji kualitas data dengan menggunakan uji realibitas dan validitas serta Uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolonieritas. realibitas dan validitas serta uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolonieritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif menunjukkan bahwa jumlah responden berjumlah 92 pegawai, namun kuesioner yang lengkap dan layak untuk dianalisis sebesar 91,3% yaitu 78 kuesioner. Uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan realibilitas menunjukkan bahwa nilai r -hitung (2,136) > dari r tabel (0,536), sehingga semua pertanyaan valid dan semua variabel mempunyai nilai lebih besar dari Cronbach's Alpha sebesar 0,60 sehingga semua variabel reliabel.

Hasil uji asumsi klasik untuk uji normalitas data dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov menyebutkan nilai *asymptotic significance* (2- tailed) 0,172 yaitu lebih dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. Sedangkan uji multikolonieritas nilai *tolerance* variabel bebas memiliki nilai lebih dari 10%. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Dan untuk uji heterokedastisitas dengan menggunakan glejser diperoleh nilai hasil Sig untuk Partisipasi penyusunan anggaran (X1) adalah 0.595, Sig untuk Pelayanan Kejelasan sasaran anggaran (X2) adalah 0.839, Sig untuk Kualitas Sumberdaya Manusia (X3) 0.897, dan nilai Sig untuk Pengawasan fungsional (X4) adalah sebesar 0.399.

Uji Regresi Linear Berganda

Uji Parsial

Tabel 1. Uji t

Model	Unstantandized Coefficients		Unstantandized Coefficients		t	Sig.
	B	Std.Error	Beta			
Constant	0.003	0.005			0.611	0.543
X1	0.273	0.065	0.374		4.201	0.000
X2	0.028	0.082	0.053		0.342	0.733
X3	0.391	0.114	0.450		3.342	0.001
X4	0.000	0.000	-0.027		-0.176	0.861

a. Dependent Variable : Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2020)

Dari tabel di atas didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 0.003 + 0.273 X1 + 0.028 X2 + 0.391 X3 + 0.000 X4 + e$$

Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh t tabel = 1,990 ; t hitung = 4.201. Berarti t hitung > t tabel dan nilai signifikan 0.000 < 0,05, maka Ho ditolak H₁ diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran (X1) berpengaruh positif terhadap Kinerja aparat Pemerintah Daerah (Y). Hasil uji SPSS kedua diperoleh t tabel = 1.990; t hitung = 0.342. Berarti t hitung < t tabel dan nilai signifikan 0.733 > 0.05, maka Ho diterima H₂ ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran (X2) tidak berpengaruh terhadap Kinerja aparat Pemerintah Daerah (Y). Hasil uji ketiga diperoleh t tabel = 1.990 ; t hitung = 3.342 . Berarti t hitung > t tabel dan nilai signifikan 0,001 < 0.05 maka Ho ditolak H₃ diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa Kualitas sumberdaya manusia (X3) berpengaruh positif terhadap Kinerja aparat Pemerintah Daerah (Y). Hasil uji SPSS keempat diperoleh $t_{\text{tabel}} = 1.990$; $t_{\text{hitung}} = -0.176$. Berarti $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikan $0.861 > 0.05$, maka H_0 diterima H_4 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan fungsional (X4) tidak berpengaruh terhadap Kinerja aparat Pemerintah Daerah (Y).

Uji Simultan

Tabel 2. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F
Regression	0.001	4	0.000	32.433
Residual	0.000	79	0.000	
Total	0.001	83		

- Dependent Variable : Y
- Predictors Variable : X1, X2, X3, X4

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan dan gambar tersebut, dimana $F_{\text{tabel}} = 2.49$, $F_{\text{hitung}} = 32.433$. Berarti $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara Partisipasi penyusunan anggaran (X1), Kejelasan sasaran anggaran (X2), Kualitas sumberdaya manusia (X3) dan Pengawasan fungsional (X4) terhadap variabel Kinerja aparat Pemerintah Daerah (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	0.788	0.622	0.602	0.0237

- Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4
- Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2020)

Tabel 3 menunjukkan angka determinan (R) atau R-square yang digunakan untuk mengukur kemampuan variabel Partisipasi penyusunan anggaran (X1), Kejelasan sasaran anggaran (X2), Kualitas sumberdaya manusia (X3) dan Pengawasan fungsional (X4) dalam menjelaskan variabel Kinerja aparat Pemerintah Daerah (Y). Hasil analisis regresi menunjukkan adjusted R-square sebesar 0.602 artinya 60.2% variasi Kinerja aparat Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari empat variabel independen yaitu

Partisipasi penyusunan anggaran, Kejelasan sasaran anggaran, Kualitas sumberdaya Manusia, dan Pengawasan fungsional. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 39.8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai t hitung = 4.201 > dari nilai t tabel = 1.990 (t hitung lebih besar dari t tabel) dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 Sedangkan α sebesar 5% (0,050) dengan $df=79$ diperoleh t tabel = 1.990. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis 1 diterima** artinya Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Sri Rahayu, et al. (2014) Mediaty (2010) dan Mertayani Sari Dewi, et al. (2015) bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah.

Variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja dikarenakan dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran pada organisasi publik tentu akan lebih meningkatkan komunikasi antara bawahan dengan atasan dalam membuat keputusan bersama sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan motivasi dalam bekerja.

2. Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai t hitung = 0.342 < dari nilai t tabel = 1.990 (t hitung lebih kecil dari t tabel) dengan nilai signifikansi sebesar 0.733 Sedangkan α sebesar 5% (0,050) dengan $df=79$ diperoleh t tabel = 1.990. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis 2 ditolak** artinya Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Pratiwy Suwandi (2013) membuktikan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Padang.

Variabel Kejelasan sasaran anggaran pada penelitian ini tidak memberikan kontribusi pada Kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari yang seharusnya kejelasan sasaran anggaran ini menjadi hal yang mestinya harus jelas sehingga dapat memudahkan pimpinan dalam OPD untuk bertindak dan memenuhi capaian sasaran Kinerja Pemerintah Daerah, namun tidak memiliki dampak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, sehingga dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah hanya mampu menjelaskan pengaruh positif dan signifikan di tempat lain.

3. Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai t hitung = 3.342 > dari nilai t tabel = 1.990 (t hitung lebih besar dari t tabel) dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 Sedangkan α sebesar 5% (0,050) dengan $df=79$ diperoleh t tabel = 1.990. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis 3 diterima** artinya Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh hasil penelitian inipun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Sri Rahayu, et al. (2014) dan Suharto (2012) dan Mertayani Sari Dewi, (2015) yang menunjukan bahwa Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, hal ini menjadi penting karena aparatur yang handal dan berkualitas akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur.

4. Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai t hitung = -0.176 < dari nilai t tabel = 1.990 (t hitung lebih kecil dari t tabel) dengan nilai signifikansi sebesar 0.861 Sedangkan α sebesar 5% (0,050) dengan $df=79$ diperoleh t tabel = 1.990. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis 4 ditolak** artinya Pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mertayani Sari Dewi, (2015), Putri (2013) dan didukung oleh Ni Luh Sri Rahayu, et al. (2014) yang menunjukan Pengawasan Fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja aparat Pemerintah Daerah .

Dengan adanya pengawasan fungsional, seharusnya anggaran menjadi terkontrol dengan baik sehingga semakin tinggi Pengawasan Fungsional akan memberikan kontribusi yang baik dan dapat tercapainya suatu tujuan terhadap Kinerja aparat Pemerintah Daerah. Pengawasan fungsional tidak berdampak pada kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, sehingga dari variabel pengawasan fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah hanya mampu menjelaskan pengaruh positif dan signifikan di tempat lain.

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN

Kesimpulan

1. Partisipasi penyusunan anggaran (X1) berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah (Y) di lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Manokwari
2. Kejelasan sasaran anggaran (X2) tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah (Y) di lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Manokwari
3. Kualitas sumberdaya manusia (X3) berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah (Y) di lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Manokwari
4. Pengawasan fungsional (X4) tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah (Y) di lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Manokwari

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan dampak positif bagi OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari. Dampak positifnya yaitu dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Kinerja aparat pada masing-masing OPD sehingga mampu memaksimalkan penggunaan dan penyerapan anggaran sesuai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hasil dari penerapan kinerja yang baik akan memberikan tingkat kepuasan bagi masyarakat .

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang wajib diperhatikan oleh peneliti-peneliti berikutnya diantaranya :

1. Populasi dalam penelitian ini dilakukan di lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Manokwari, sehingga bagi peneliti berikutnya bisa memperluas lokasi penelitian di lingkup OPD Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

REFERENSI

- Afrida, Nur. (2013) "Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)" Universitas Negeri Padang.
- Asmoko, Hindri. (2006) "Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian" melalui (<http://www.bppk.depkeu.go.id>)
- Annisa, Pratiwi Suwandi. (2013) "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)" Jurnal Universitas Negeri Padang.
- Auditya Lucy, Husaini dan Lismawati. (2013) "Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1 : 21- 42 (ISSN 2303- 0348).

- Bastian, Indra. (2006) “Akuntansi Sektor Publik” Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Bukhori, Iqbal dan Rahardja. (2012) “Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010). *Diponegoro Journal of Accounting* Volume 1, Nomor 1.
- Friyanti, Deny. (2019) “Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi pada BPKAD Kabupaten Bondowoso)” Tesis Program Studi Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Jember. Jember.
- Hevyana Naipospos, Taufeni Taufik, dan Julita. (2015) “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru)” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Volume 2, Nomor 1 (ISSN 2355 – 6854).
- Laksana, Agung Puja dan Bestari Dwi Handayani. (2014) “ Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Batang” *Accounting Analysis Journal* Volume 3, Nomor 2 (ISSN 2252 – 6765).
- Mahsun, Mohammad. (2006) “Pengukuran Kinerja Sektor Publik” Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002) “Akuntansi Sektor Publik” Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mediaty. (2010) “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan” *Majalah Ekonomi Universitas Airlangga*, Volume 20, Nomor 3.
- Mertyani Sari Dewi, Nyoman Ari Surya Darmawan dan Desak Nyoman Sri Werastuti. (2015) “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Bangli)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha* Volume 3, Nomor 1 (ISSN 2614 – 1930).
- Milani, K. (1975) “The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitude: a Field Study” *The Accounting Review*, pp. 274 -284.
- Mulyani, S. (2016) “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial” Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Munawar. (2006) “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku Sikap Kinerja Aprat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang” *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Ni Luh Sri Rahayu, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Ni Kadek Sinarwati. (2014). “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumberdaya Manusia, dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha* Volume 2, Nomor 1 (ISSN 2614 – 1930).
- Nurhalimah. (2013) “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintah Aceh” *Jurnal Teknik Sipil*. (ISSN 2302 – 0164).
- Putra, Adnyana. (2013) “Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Hubungan antara Kinerja dengan Nilai Perusahaan. *E-Journal Universitas Udayana* Volume 5, Nomor 3.
- Putri, Mega Rosa Arini. (2013) “ Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Kompensasi Finansial terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Dunia Garment Internasional Denpasar” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 11, Nomor 2.

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2007) Nomor :PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Riawan. (2016) “Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kualitas Anggaran terhadap Kinerja Keuangan yang dimoderasi dengan SIMDA pada SKPD Kabupaten Buton Utara” *Jurnal Ekonomo dan Studi Pembangunan Universitas Negeri Malang*, Volume 8, Nomor 1 (ISSN 2086 – 1575).
- Reyhan Hadi Fauzan, Azwir Nasir, dan Sem Paulus Silalahi. (2017) “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota)” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* Volume 4, Nomor 1 (ISSN 2355 – 6854).
- Soetrisno. (2010) “Pengaruh Partisipasi, Motivasi dan Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial” Tesis Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suharto, Agus Ali. (2012) “Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Komitmen dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Kediri” *Jurnal Revitalisasi : Ilmu* Volume 1, Nomor 3 (ISSN 23015179 – 26571684).
- Suhartono, Ehrmann dan Muhammad Solichin. (2006) “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi” *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Sumiati, I Dewa Ketut Raka Ardiana dan Auliya Ika Pratiwi. (2018) “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Quality of Work Life terhadap Organization Citizenship Behavior dan Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* Volume 5, Nomor 1 (ISSN 2355 – 7435).
- Syafrial. (2009) “Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Sarolangun” Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wati, Elya Lismawati dan Nila Aprilla. (2010) “Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemahaman Good Corporate Governance terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Bengkulu)” *Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto*.
- Wibowo. (2007) “Manajemen Sumberdaya Manusia: Teori, Aplikasi, dan Isu Penelitian” Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Yusuf, Burhanuddin. (2015). “Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah” Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta